

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Jakarta, Sinar Grafika Offset

Anto. S, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, kencana Prenada media Group

Bambang Sutyoso, 2019 *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, PT. Alumni

Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Yogyakarta, Grup Penerbit CV Budi Utama

Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Penerbit Chandra Pratama.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihsn Metode dan Praktik Penulisan Artikel*”, Mira Buana, Yogyakarta

Man S. Sastrawidjaja, 2006, *“Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, Bandung, PT. Alumni

Munir Fuady, 2002, *“Hukum Pailit”*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Pangabea, 2023, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Praenada Media Group.

Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, -cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers.

kti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Ke4, Cet Ke-1



Sobandi, 2021, Limitasi Hakim (Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga), Jakarta, Rayyana Komunikasiindo

Jurnal

Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1

Al Araaf Ode Pota, A. Suyaman M. Pide, Sri Susyanti Nur, 2019, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa, Mataram, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum.

Albert Tandean, Nurfaidah Said & Sabir Alwy, 2021, Ketidakhadiran Debitor Dalam Pelaksanaan Pembaharuan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Sumatra Barat, Pagaruyuang Law Journal, Volume 4 No. 2

AKD Prinsen van Wijmen, 2002, "*Bankruptcy and Fresh Start: Stigma on Failure and Legal Consequence of Bankruptcy*," The Dutch Report

Atika Ismail, 2021, Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi, Palembang, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No.1

Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: UII Press

Catur Irianto, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Pekanbaru, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2018, Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata, JHAPER, Vol. 4, No.1.



E. T, 2016 Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan, Denpasar, Jurnal Akses, Volume 8 Nomor 1 Juni 2016, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Didin R Dinovan, 2019, *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati*, Jakarta, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 2

Elviana Sagala, 2015, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit*, STIH Labuhan Batu, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 03. No. 01

Fence M. Wantu, 2007, *AnZmoni Dalam Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer. hal.1–6.doi:10.1007/978-981-10-0114-7_1.ISBN978-981-10-0114-7, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 10.38 WIB.

Gunardi Lie, Jeane Neltje Saly, Ariawan Gunadi dan Adriel Michael Tirayo, 2016, *Problematisasi UU NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis*, Jakarta, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia ISSN 2620-7710 (Versi Cetak) Vol. 2, No. 2

I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana, 2016, *Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)*, Universitas Udayana, ADHAPER Vol. 2, No. 1

I Wayan Yasa, Echwan Iriyanto, 2023, *Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Jember, JURNAL RECHTENS, Vol. 12, No. 1

Iviah Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta, LaksBang

Muhammad Ridwan dan Akhmad Dani, 2023, *Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Kerangka Sistem Kekuasaan Kehakiman*, Palembang, Solusi, Volume 21 Nomor 1

Mahkamah Agung RI, tanpa tahun., *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga*, Jakarta, Mahkamah Agung RI



I Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2020, *Asas-Asas Putusan Hakim*, (Hakim Pengadilan Agama Bajawa – NTT)

Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiat, 2021, *Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)*, Denpasar, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1

Putu Eka Trisna Dewi, 2023, *Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan*, Denpasar, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, Nomor 01

R. Tony Prayoga, 2016, Penerapan Asas KepasZan Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah KonsZtusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Legal Cetainty and Judicial Review.

Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, Denpasar, Jurnal Aktual Justice, Vol.6, No.1

Raimond Flora Lamandasa, 2011, Penegakan Hukum, dikuZp dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis Berjudul KepasZan Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Rommy Haryanto Djojarahrdjo, 2019, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya

Robinton Sulaiman, Joko Prabowo, 2000, "Lebih Jauh Tentang Kepailitan (Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit", Tangerang, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci

Sri Redjeki Hartini, 2008, Hukum Kepailitan, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press

Serlika Aprita, 2019, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit*, Palembang, Samudra Keadilan, Volume 14, Nomor 1



risah, 2009, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan KepentinganKreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 16

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, Asas Kepas=an Hukum Menurut Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume Nomor 2, Tanjung Jabung Barat

Sumurung P. Simaremare, 2010, Bismar Nasution, Sunarmi dan Edi Yunara, Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, Medan, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2

Tata Wijayanta, 2008, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 2

Which, 1995, "Legal Standards Control the Treatment of an Upstream Guaranty?" 17 Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J. 409

Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

